

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan desa wisata di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2020 jumlah desa wisata yang terdaftar mencapai sekitar 1.800 desa, kemudian meningkat menjadi lebih dari 3.500 desa pada tahun 2024 (Kemenparekraf, 2024). Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan pertumbuhan jumlah desa wisata, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pembangunan pariwisata. Jika sebelumnya pengembangan desa wisata lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan promosi yang bersifat *top-down*, sejak tahun 2020 pendekatan tersebut bergeser menjadi *bottom-up* dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi wisata (Afriza dkk., 2025). Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya perhatian terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pariwisata.

Perubahan paradigma tersebut diperkuat oleh berbagai kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi lokal, termasuk melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dukungan tersebut diperkuat melalui Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 yang menetapkan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNA) 2021–2025 juga menempatkan desa wisata sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi sekaligus pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Kemenparekraf, 2023, t.t.).

Sejalan dengan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang aktif mengembangkan desa wisata melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi lokal. Berbagai kebijakan

yang dijalankan pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian budaya dan lingkungan. Kondisi tersebut mendorong semakin banyak desa di Jawa Barat mengembangkan potensi wisata yang dimiliki berdasarkan karakteristik sosial dan budayanya masing-masing.

Salah satu desa wisata yang memiliki karakteristik tersebut adalah Desa Wisata Cangkuang di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Desa ini dikenal sebagai destinasi wisata budaya karena memiliki Candi Cangkuang, satu-satunya candi bercorak Hindu yang masih tersisa di wilayah Tatar Sunda, serta keberadaan Kampung Pulo yang hingga kini tetap mempertahankan tradisi adat leluhur. Didukung oleh Situ Cangkuang dan lanskap pedesaan yang masih terjaga, kawasan ini tidak hanya menjadi tujuan rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, pendidikan, budaya, dan religi sehingga menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Garut.

Pengelolaan Desa Wisata Cangkuang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat berperan dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut bertanggung jawab terhadap pengembangan destinasi, penyediaan sarana pendukung, promosi wisata, dan pelayanan kepada wisatawan. Selain kedua lembaga tersebut, pemerintah desa, komunitas adat Kampung Pulo, pelaku UMKM, kelompok sadar wisata, dan masyarakat setempat juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan desa wisata. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Cangkuang tidak hanya bergantung pada potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Meskipun memiliki potensi budaya dan sejarah yang besar, pengembangan Desa Wisata Cangkuang masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga integrasi antara upaya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata masih menghadapi berbagai kendala. Di

sisi lain, kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pelayanan wisata, interpretasi warisan budaya, dan pemasaran digital juga masih perlu ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif.

Dari perspektif wisatawan, aksesibilitas menuju kawasan wisata masih menjadi salah satu kendala akibat keterbatasan transportasi umum serta belum optimalnya penyebaran informasi melalui media digital. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap daya tarik destinasi sekaligus membatasi peluang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, keterlibatan warga dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata belum berlangsung secara merata sehingga manfaat pengembangan desa wisata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Keberadaan Kampung Pulo sebagai komunitas adat yang menjadi ikon Desa Wisata Cangkuang turut menghadirkan tantangan tersendiri. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada saat yang sama nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tetap harus dilestarikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya agar pengembangan wisata tidak mengurangi nilai autentisitas kawasan budaya tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Cangkuang tidak hanya ditentukan oleh potensi sejarah, budaya, maupun lingkungan yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang terbangun di antara para aktor yang terlibat. Hubungan antara masyarakat, komunitas adat Kampung Pulo, pemerintah desa, Balai Pelestarian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, pelaku UMKM, serta kelompok sadar wisata menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang masih menunjukkan dinamika yang beragam.

Sebagian masyarakat telah berperan aktif melalui kegiatan usaha, pelayanan wisata, maupun pelestarian budaya, sedangkan sebagian lainnya belum memiliki kesempatan maupun kapasitas yang sama untuk terlibat secara optimal. Perbedaan tingkat partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa hubungan sosial antaraktor belum sepenuhnya mampu menciptakan kerja sama yang merata dalam mendukung pengembangan desa wisata.

Selain partisipasi masyarakat, keberhasilan pengembangan Desa Wisata Cangkuang juga dipengaruhi oleh jaringan sosial yang terbentuk di antara berbagai aktor. Melalui jaringan tersebut, para pemangku kepentingan dapat membangun koordinasi, bertukar informasi, memperoleh dukungan, serta mengakses berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan destinasi wisata. Akan tetapi, pola hubungan antaraktor, proses terbentuknya jaringan sosial, maupun posisi masing-masing aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Cangkuang masih belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya memahami hubungan sosial sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan desa wisata.w

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Cangkuang tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sejarah, budaya, dan lingkungan yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial yang terbangun di antara para aktor yang terlibat. Kepercayaan, norma, jaringan sosial, dan partisipasi masyarakat merupakan sumber daya yang dapat memperkuat kerja sama, memperlancar koordinasi, serta mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Dalam kajian sosiologi, sumber daya tersebut dipahami sebagai modal sosial yang memiliki peran penting dalam mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, modal sosial dipahami sebagai sumber daya yang lahir dari kepemilikan dan pemanfaatan jaringan hubungan sosial (Bourdieu, 1986). Jaringan tersebut tidak hanya menjadi sarana membangun kerja sama, tetapi juga memberikan akses terhadap informasi, peluang, dukungan, dan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan individu maupun kelompok untuk memperkuat posisinya dalam suatu arena

sosial. Perspektif ini relevan digunakan untuk memahami pengembangan Desa Wisata Cangkuang karena melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat lokal, komunitas adat Kampung Pulo, pemerintah desa, Balai Pelestarian Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, kelompok sadar wisata, serta pelaku UMKM yang saling berinteraksi dalam proses pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata Cangkuang di Kecamatan Leles Kabupaten Garut penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam mendukung partisipasi masyarakat, memperkuat kerja sama antaraktor, serta menunjang pengembangan desa wisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya mengenai modal sosial, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata Cangkuang secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan mengenai modal sosial dalam pengembangan desa wisata di atas. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana bentuk modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengembangan Desa Wisata Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut?
3. Bagaimana dampak modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirancang, penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk-bentuk modal sosial yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
2. Mendeskripsikan pengembangan Desa Wisata Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
3. Menjelaskan dampak modal sosial dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi, sekaligus menghadirkan kegunaan sosial bagi masyarakat. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Pariwisata. Secara ilmiah, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman teoretis mengenai konsep modal sosial dalam konteks pembangunan desa wisata berbasis masyarakat.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara modal sosial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Temuan empirisnya dapat dijadikan rujukan bagi peneliti dan akademisi dalam mengkaji peran kepercayaan, norma, dan jaringan sosial sebagai faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan pembangunan berbasis komunitas di Indonesia.

2. Kegunaan Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku wisata di Desa Cangkuang. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan:

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial lokal.
- b. Bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam memperkuat jejaring sosial, meningkatkan koordinasi, dan memperluas kolaborasi antarpelaku wisata.
- c. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kepercayaan, kerja sama, dan solidaritas sosial sebagai fondasi dalam mengelola potensi wisata secara kolektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, manfaat sosial dari penelitian ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya desa wisata yang mandiri, partisipatif, dan berkeadilan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat Desa Cangkuang dalam menghadapi dinamika pembangunan pariwisata.

E. Kerangka Berpikir

Pengembangan desa wisata pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi alam maupun budaya yang dimiliki suatu wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai sumber daya sosial yang tersedia (Sunyoto dkk., 2024). Dalam konteks Desa Wisata Cangkuang, keberadaan Candi Cangkuang dan Kampung Adat Pulo merupakan aset budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan religius yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh keterlibatan masyarakat serta hubungan sosial yang mampu mendorong kerja sama dalam proses pengelolaan dan pengembangan desa wisata (Saragih & Yanti, 2024). Oleh karena itu, pengembangan Desa Wisata Cangkuang tidak hanya

dipengaruhi oleh potensi fisik yang dimiliki, tetapi juga oleh modal sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, modal sosial merupakan sumber daya yang diperoleh individu maupun kelompok melalui kepemilikan jaringan hubungan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan (Bourdieu, 1986). Jaringan tersebut memungkinkan setiap aktor memperoleh akses terhadap informasi, dukungan, pengakuan, maupun berbagai sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya dipahami sebagai adanya kepercayaan atau kerja sama, tetapi juga sebagai sumber daya yang muncul dari hubungan sosial yang dimiliki para aktor dalam suatu arena sosial.

Modal sosial dalam penelitian ini dipahami melalui hubungan yang terjalin antara masyarakat lokal, komunitas adat Kampung Pulo, pemerintah desa, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, serta aktor lainnya yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang. Melalui jaringan hubungan tersebut, setiap aktor memiliki kesempatan yang berbeda dalam memperoleh informasi, membangun kerja sama, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

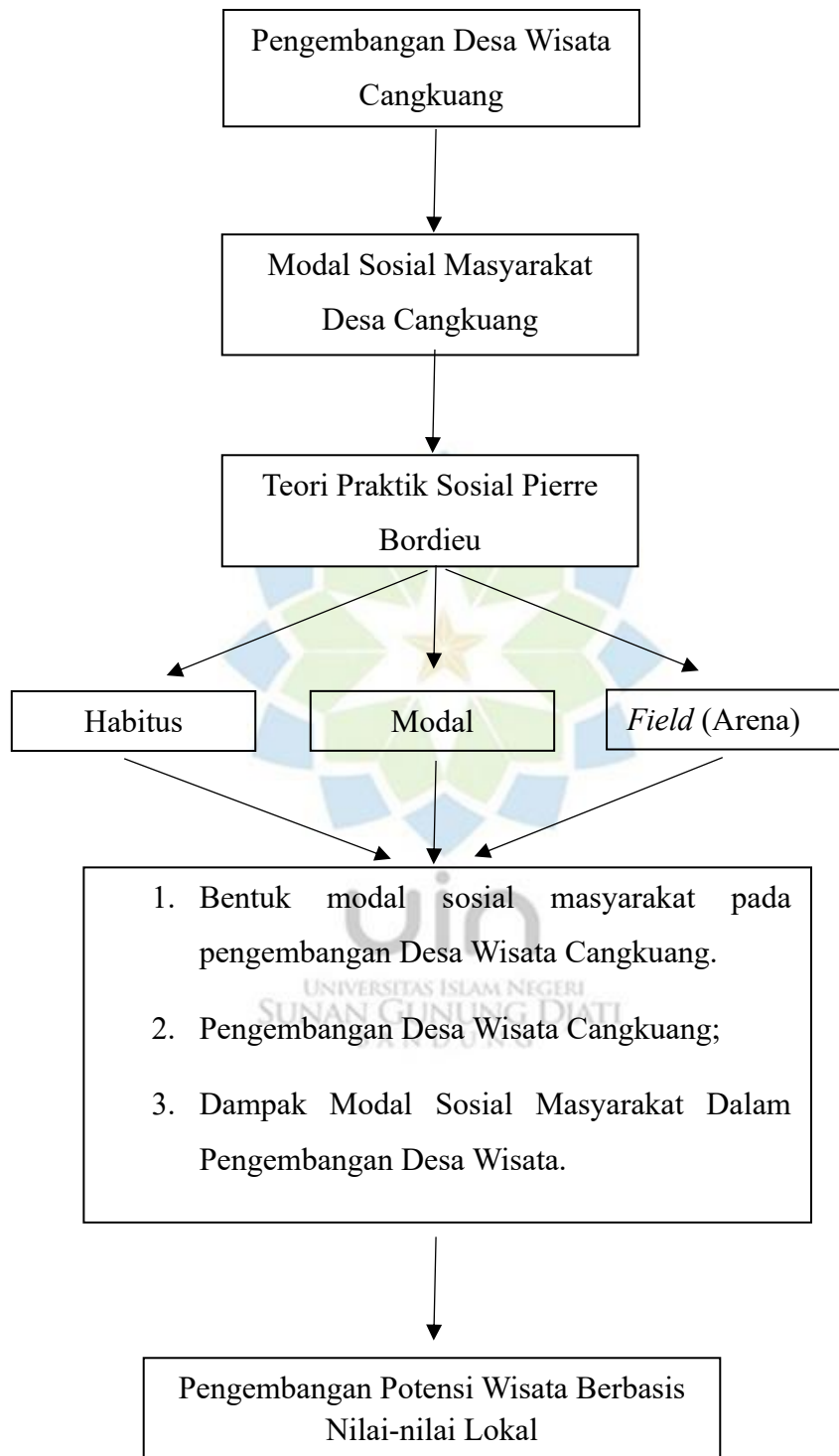
Menurut teori praktik sosial Pierre Bourdieu, modal sosial tidak dapat dipisahkan dari habitus dan arena (*field*) sebagai unsur yang saling berkaitan dalam membentuk praktik sosial (Bourdieu, 1991). Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial, kemudian membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu maupun kelompok. Dalam masyarakat Desa Cangkuang, habitus tercermin melalui kebiasaan bergotong royong, kepatuhan terhadap nilai dan aturan adat Kampung Pulo, kepedulian terhadap pelestarian budaya, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan (Sumardani dkk., 2025). Kebiasaan tersebut membentuk cara pandang masyarakat bahwa pelestarian budaya dan pengembangan desa wisata merupakan tanggung jawab bersama.

Habitus tersebut kemudian berinteraksi dalam arena pengembangan Desa Wisata Cangkuang yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, peran, dan sumber daya yang berbeda. Arena tidak hanya menjadi ruang terjadinya interaksi sosial, tetapi juga menjadi ruang koordinasi, negosiasi, dan pertukaran sumber daya antaraktor. Dalam arena tersebut, pemerintah daerah berupaya mengembangkan sektor pariwisata, Balai Pelestarian Kebudayaan berfokus pada pelestarian cagar budaya, masyarakat adat menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi, sementara masyarakat lokal dan pelaku UMKM berupaya memperoleh manfaat ekonomi melalui aktivitas pariwisata. Perbedaan kepentingan tersebut menuntut adanya hubungan sosial yang mampu membangun kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Interaksi antara habitus, modal sosial, dan arena selanjutnya melahirkan berbagai praktik sosial dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang. Praktik sosial tersebut tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, kerja sama antaraktor, pelestarian budaya lokal, pengembangan usaha masyarakat, serta berbagai bentuk kolaborasi yang mendukung keberlanjutan desa wisata. Dengan demikian, praktik pengembangan Desa Wisata Cangkuang dipahami sebagai hasil interaksi antara habitus masyarakat, modal sosial yang dimiliki para aktor, dan arena pengembangan desa wisata yang mempertemukan berbagai kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam pengembangan Desa Wisata Cangkuang. Melalui perspektif Pierre Bourdieu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana habitus masyarakat membentuk modal sosial, bagaimana modal sosial dimanfaatkan oleh berbagai aktor dalam arena pengembangan desa wisata, serta bagaimana interaksi ketiga unsur tersebut menghasilkan praktik-praktik sosial yang mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Cangkuang secara berkelanjutan. Kerangka hubungan antarkonsep tersebut selanjutnya disajikan pada Gambar 1.1

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti, (2026)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang bahwa modal sosial memiliki peran yang strategis dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Cangkuang. Modal sosial yang diwujudkan melalui kepercayaan, jaringan sosial, kerja sama, dan partisipasi masyarakat terbentuk dari habitus yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat serta dimanfaatkan dalam arena pengembangan desa wisata yang melibatkan berbagai aktor (Bourdieu, 1986). Hubungan antara habitus, modal sosial, dan arena tersebut kemudian melahirkan praktik-praktik sosial yang mendukung pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan potensi wisata budaya secara berkelanjutan. Dengan demikian, semakin kuat modal sosial yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya pengembangan Desa Wisata Cangkuang yang berkelanjutan, mampu menjaga nilai-nilai budaya lokal, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

